

**ANALISIS PAJAK PENDAPATAN BADAN DAN KAITANNYA DENGAN
KEBIJAKAN KEUANGAN KOPERASI DAN MANFAAT EKONOMI TIDAK
LANGSUNG**

(Studi Kasus pada Koperasi Karyawan BJB (Ziebar) di Bandung)

SKRIPSI

Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Manajemen

Disusun Oleh:

Amalia Khairunisa

C1150296

Dosen Pembimbing:

Dr. H. Sugiyanto, SE., M.Sc



**KONSENTRASI MANAJEMEN KEUANGAN
PROGRAM STUDI S-1 MANAJEMEN
INSTITUT MANAJEMEN KOPERASI INDONESIA**

2019

LEMBAR PENGESAHAN

Judul Skripsi : Analisis Pajak Pendapatan Badan dan Kaitannya dengan Kebijakan Keuangan dan Manfaat Ekonomi Tidak Langsung

Nama Mahasiswa : Amalia Khairunisa

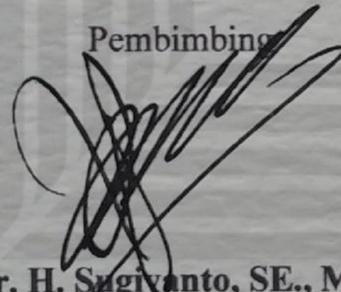
Nomor Pokok : C1150296

Program Studi : S-1 MANAJEMEN

Konsentrasi : Manajemen Keuangan

MENYETUJUI DAN MENGESAHKAN

Pembimbing



Dr. H. Sugiyanto, SE., M.Sc

Direktur Program Studi S-1 Manajemen



Dr. H. Gijanto Purbo Suseno, SE., M.Sc

RIWAYAT HIDUP

Penulis dilahirkan pada tanggal 03 September 1997 di Matraman, Jakarta dengan nama lengkap Amalia Khairunisa. Penulis merupakan anak kedua dari tiga bersaudara.

Adapun riwayat pendidikan formal dan pengalaman organisasi yang telah Peneliti tempuh adalah sebagai berikut :

1. Pendidikan Formal Peneliti

- Tahun 2009 lulus dari Sekolah Dasar (SD) Negeri 1 Cipayung, Kecamatan Sukmajaya, Depok, Jawa Barat.
- Tahun 2012 lulus dari Sekolah Menengah Pertama Negeri (SMPN) 4 Depok, Kecamatan Sukmajaya, Depok, Jawa Barat.
- Tahun 2015 lulus dari Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Negeri 1 Cibinong, Karadenan, Kabupaten Bogor, Jawa Barat.
- Tahun 2015 penulis mencatatkan diri sebagai mahasiswa Institut Koperasi Indonesia (IKOPIN), jurusan manajemen keuangan.

2. Pengalaman Organisasi Peneliti

- Anggota Student Exchange Periode 2014-2015
- Anggota KKB IKOPIN
- Anggota English Club Tahun 2015-2017
- Anggota Student Exchange Periode 2017

ABSTRACT

AMALIA KHAIRUNISA, *Analysis of Corporate Income Tax and its Relation to Financial Policy and Indirect Economic Benefits. (Case Study at Koperasi BJB (ZIEBAR) Bandung) under the guidance of Dr. H. Sugiyanto, M.Sc.*

Some of the important decisions faced by cooperatives are investment decision, funding decision and SHU distribution policy. The Investment decision can be seen through by cooperative assets, and in assets there is a cost in depreciation that must be taken into account. In funding decisions can be seen though the capital structure, financial decisions is relating to the composition of debt. SHU distribution policy can be seen through the profitability in Koperasi Karyawan BJB (ZIEBAR).

The method used in this study is case study approach, case study approach is the research method by collecting data and direct observation of the object under study with the aim of knowing and understanding the problem solving at Koperasi Karyawan BJB (ZIEBAR).

Based on the results of the study, it is known that corporate income tax is related to financial policy and indirect economic benefits. Corporate income tax related to investment decisions which can be seen from assets. In fixed assets there are assets which calculated as depreciation expenses as non-cash expenses. Because depreciation will reduce the net income which automatically reduces taxes.

Corporate income tax is interrelated with funding decisions in which the interest expense of the loan or Cost of Debt from the use of debt. When the loan interest rises, the tax will decrease. If capital is fully funded by its own capital, the interest on the loan will be lost, net income will increase and income tax will also increase.

When debt is assumed to be lost and capital is met by its own capital, this is very influential on dividend policy. SHU distribution policy can be seen from the profitability of cooperatives that have an impact on the earning after tax, so if earning after tax increase, Return on Equity will increase.

Indirect economic benefits are related to changes in corporate income tax after debt is assumed to be lost and capital is fully funded by its own capital. Indirect Economic Benefits related to taxes because when assumed the use of capital is fully funded by its own capital, then the tax will increase.

Password: Corporate Income Tax, Financial Policy, Indirect Economic Benefits

RINGKASAN

AMALIA KHAIRUNISA, Analisis Pajak Pendapatan Badan dan Kaitannya dengan Kebijakan Keuangan dan Manfaat Ekonomi Tidak Langsung. (Studi Kasus pada Koperasi Karyawan BJB (ZIEBAR) Bandung) dibawah bimbingan **Bapak Dr. H. Sugiyanto, M.Sc.**

Salah satu keputusan penting yang dihadapi oleh Koperasi adalah keputusan investasi, keputusan pendanaan dan kebijakan pembagian Sisa Hasil Usaha (SHU).. Pada keputusan investasi dapat dilihat melalui aset koperasi, dan didalam aset ada beban depresiasi yang harus diperhitungkan. Dalam keputusan pendanaan dapat dilihat dengan struktur modal, yaitu keputusan keuangan yang berkaitan dengan komposisi utang. Kebijakan pembagian SHU dapat dilihat melalui profitabilitas koperasi.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan studi kasus (*case study*), yaitu metode penelitian dengan cara mengumpulkan data dan pengamatan langsung terhadap objek yang diteliti dengan tujuan untuk mengetahui dan memahami pemecahan masalah yang ada di Koperasi Karyawan BJB (ZIEBAR).

Berdasarkan hasil penelitian, diketahui bahwa pajak penghasilan badan berkaitan dengan kebijakan keuangan dan manfaat ekonomi tidak langsung. Pajak penghasilan badan berkaitan dengan keputusan investasi yang dilihat dari aset. Dalam aset tetap ada aset yang dihitung sebagai biaya penyusutan sebagai biaya non tunai. Karena depresiasi akan mengurangi Sisa Hasil Usaha yang secara otomatis mengurangi pajak. Pajak penghasilan badan saling terkait dengan keputusan pendanaan di mana beban bunga pinjaman atau biaya utang dari penggunaan utang. Ketika bunga pinjaman naik, pajak akan berkurang. Jika modal sepenuhnya didanai oleh modal sendiri, bunga pinjaman akan hilang, SHU akan meningkat dan pajak penghasilan juga akan meningkat.

Ketika hutang diasumsikan hilang dan modal dipenuhi dengan modal sendiri, ini sangat berpengaruh pada kebijakan pembagian SHU. Kebijakan pembagian SHU dapat dilihat dari profitabilitas koperasi yang berdampak pada Sisa Hasil Usaha setelah pajak, sehingga jika SHU meningkat, *Return on Equity* akan meningkat.

Manfaat ekonomi tidak langsung terkait dengan pajak penghasilan perusahaan setelah hutang diasumsikan hilang dan modal dipenuhi oleh modal sendiri. Manfaat Ekonomi Tidak Langsung berkaitan dengan pajak karena ketika penggunaan modal diasumsikan dipenuhi oleh modal sendiri, maka pajak akan meningkat.

Kata Kunci: Pajak Pendapatan Badan, Kebijakan Keuangan, Manfaat Ekonomi Tidak Langsung

KATA PENGANTAR



Atas Izin dan Kepastian Ilmu Allah SWT, yang telah menciptakan semesta ini serta telah melimpahkan Rahmat dan Karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“Analisis Pajak Pendapatan Badan dan Kaitannya Dengan Kebijakan Keuangan Koperasi Dan Manfaat Ekonomi Tidak Langsung”** (Studi Kasus pada Koperasi Karyawan BJB (ZIEBAR) Bandung).

Skripsi ini disusun guna meraih gelar Sarjana Manajemen pada Institut Koperasi Indonesia. Selama proses penyusunan skripsi penulis diingatkan tentang pentingnya mempelajari ilmu dan teori dari bangku kuliah untuk implementasi di lapangan khususnya di koperasi. Skripsi ini terselesaikan atas dukungan dan bantuan dari berbagai pihak baik secara langsung maupun tidak langsung, untuk itu penulis menyampaikan terimakasih kepada:

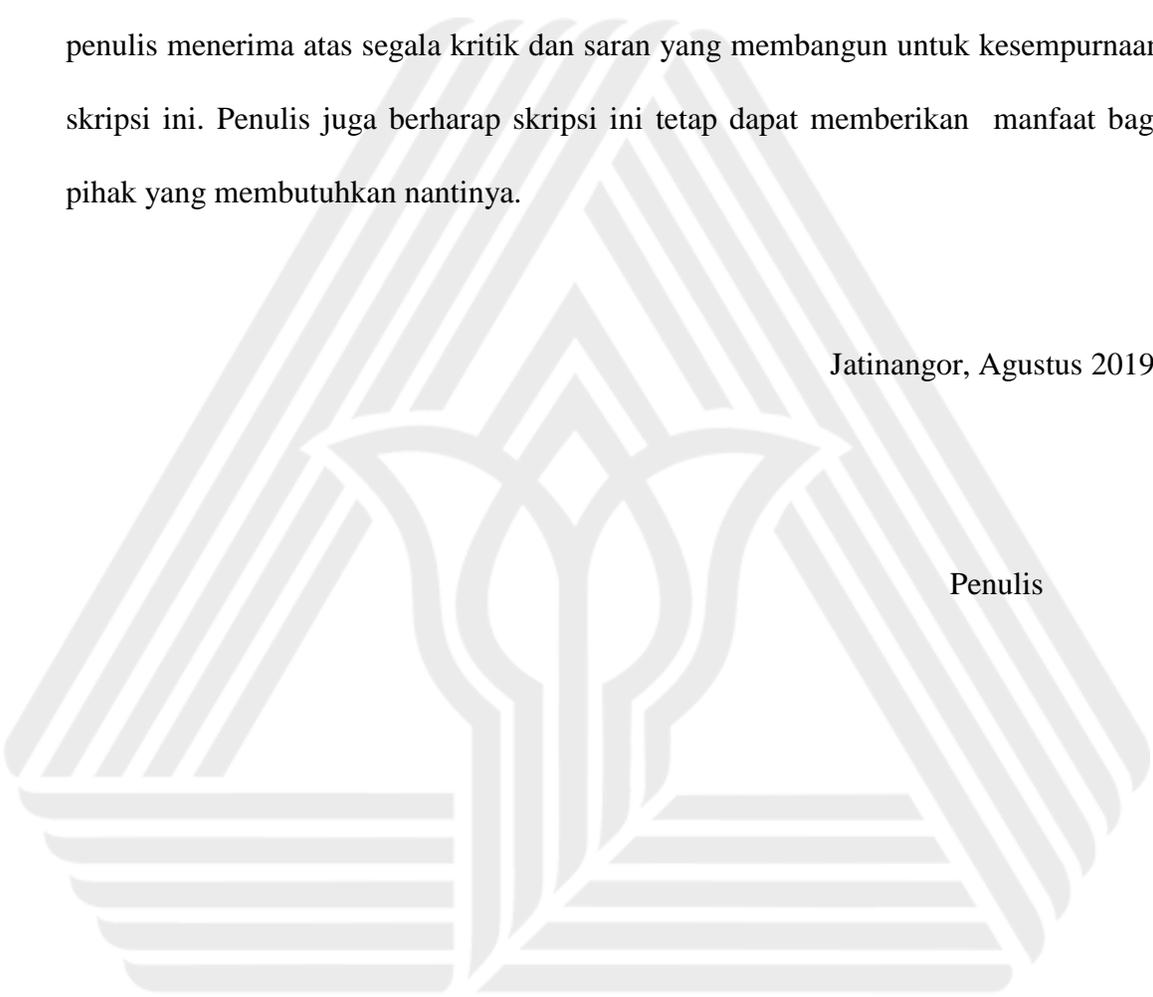
1. Allah SWT, yang senantiasa melimpahkan Rahmat dan Karunia-Nya.
2. Orang tua serta keluarga besar yang selalu membantu saya dan mendidik saya.
3. Dr. Ir. Burhanudin Abdullah , MA selaku Rektor Institut Koperasi Indonesia
4. Bapak Dr. H. Sugiyanto, SE., M.Sc. selaku Dosen Pembimbing yang telah banyak memberikan arahan, bimbingan dan motivasi dalam penyusunan skripsi ini.
5. Ibu Dra. Hj. Rosti Setiawati, M.Si selaku Dosen Penelaah Konsentrasi.
6. Bapak Ir. H. Nurhayat Indra, M.Sc selaku Dosen Penelaah Koperasi.

7. Bapak Dr. H. Gijanto Purbo Suseno, SE., M.Sc selaku Direktur Program Studi S-1 Manajemen.
8. Kementerian Koperasi dan UMKM yang telah memberikan dukungan berupa beasiswa sehingga saya dapat berkuliah di IKOPIN.
9. Seluruh Bapak Ibu dosen Ikopin yang telah memberikan bekal ilmu kepada penulis.
10. Seluruh staf karyawan Ikopin yang telah memberikan pelayanan selama kuliah dan selama proses penyusunan skripsi
11. Manajer, pengurus dan karyawan Koperasi Karyawan BJB (ZIEBAR) yang telah mengizinkan dan membantu penulis melakukan penelitian
12. Sahabat-sahabat saya atas segala kebersamaan dari pertama kuliah dan kebaikan yang tak ternilai harganya
13. Teman-teman dari awal kuliah sampai sekarang khususnya Rena, Medi, Vidya, Marusaha dan Onimus yang telah menemani dari awal kuliah sampai sekarang
14. Teman-teman seperjuangan dan sekelompok bimbingan yang telah membantu support sejak awal penelitian, Aneu, Titin, Erna, Dina, Rida, Berto, Anton, Anggi dan Holy.
15. Teman-teman kelas E angkatan 2015 dan teman-teman Manajemen Keuangan A
16. Terimakasih untuk semua pihak yang telah membantu penulis yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.

Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan skripsi ini masih jauh dari sempurna dikarenakan keterbatasan kemampuan dan pengetahuan penulis, oleh karena itu penulis menerima atas segala kritik dan saran yang membangun untuk kesempurnaan skripsi ini. Penulis juga berharap skripsi ini tetap dapat memberikan manfaat bagi pihak yang membutuhkan nantinya.

Jatinangor, Agustus 2019

Penulis



IKOPIN

DAFTAR ISI

RIWAYAT HIDUP.....	i
ABSTRACT.....	ii
RINGKASAN	iii
KATA PENGANTAR	iv
DAFTAR ISI.....	vii
DAFTAR TABEL.....	x
DAFTAR GAMBAR	xiii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1.Latar Belakang Penelitian	1
1.2. Identifikasi Masalah Penelitian	10
1.3. Maksud dan Tujuan Penelitian.....	11
1.4. Kegunaan Penelitian.....	11
1.4.1. Kegunaan Teoritis	11
1.4.2. Kegunaan Praktis.....	12
BAB II PENDEKATAN MASALAH DAN METODE PENELITIAN.....	13
2.1. Pendekatan Masalah.....	13
2.1.1. Pendekatan Perkoperasian	13
2.1.2. Pendekatan Manajemen Keuangan	23
2.1.3. Pendekatan Perpajakan atas SHU	29
2.1.4. Pendekatan Kebijakan Keuangan.....	32
2.1.5. Pendekatan Manfaat Ekonomi Tidak Langsung	35
2.1.6. Kerangka Berpikir	37
2.2. Metode Penelitian.....	38

2.2.1. Metode Penelitian yang digunakan.....	38
2.2.2. Data yang Diperlukan.....	38
2.2.3. Sumber Data	39
2.2.4. Teknik Pengumpulan Data	39
2.2.5. Operasionalisasi Variabel.....	40
2.2.6. Analisis Data.....	41
2.2.7. Tempat Penelitian	43
2.2.8. Jadwal Penelitian	43
BAB III KEADAAN UMUM TEMPAT PENELITIAN.....	44
3.1. Keadaan Organisasi dan Manajemen.....	44
3.1.1. Sejarah Terbentuknya Koperasi Karyawan BJB (Ziebar)	44
3.1.2. Struktur Organisasi Koperasi Karyawan BJB (Ziebar)	47
<i>STRUKTUR ORGANISASI KOPERASI KARYAWAN BJB (ZIEBAR)</i>	49
.....	49
3.1.3. Kegiatan Usaha Koperasi Karyawan BJB (Ziebar)	58
3.1.4. Keadaan Keuangan Koperasi Karyawan BJB (Ziebar)	60
3.1.4.1. Administrasi Keuangan dan Pembukuan.....	60
3.1.4.2. Permodalan	61
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	75
4.1. Keterkaitan Pajak Pendapatan Badan Dengan Keputusan Investasi	75
4.2 Keterkaitan pajak pendapatan dengan keputusan pendanaan	89
4.3. Keterkaitan Pajak Pendapatan Dengan Kebijakan Pembagian SHU.....	100
4.4. Keterkaitan Pajak Pendapatan Dengan Manfaat Ekonomi Anggota Tidak Langsung	104

BAB V SIMPULAN DAN SARAN	109
5.1. Simpulan	109
5.2. Saran-saran	110
DAFTAR PUSTAKA	112



IKOPIN

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 SHU Sebelum Pajak dan Pajak Pendapatan tahun 2014-2018	5
Tabel 2.1. Tarif pajak hingga Rp50 Miliar.....	31
Tabel 2.2. Tarif pajak diatas Rp50 Miliar	32
Tabel 2.3. Operasionalisasi Variabel	40
Tabel 2.4. Depresiasi pada Koperasi Karyawan BJB (Ziebar) Tahun 2014-2018.....	41
Tabel 2.5. Cash Flow Pada Koperasi Karyawan BJB (Ziebar) Tahun 2014-2018....	41
Tabel 2.6. Debt To Total Equity Ratio Koperasi Karyawan BJB (Ziebar).....	41
Tabel 2.7. Return On Equity pada Koperasi Karyawan BJB (Ziebar).....	42
Tabel 2.8. Manfaat Ekonomi Tidak Langsung Pada Koperasi Karyawan BJB (Ziebar) Tahun 2014-2018	42
Tabel 3.1 Perkembangan Jumlah Anggota Koperasi Karyawan BJB “ZIEBAR” Tahun 2014-2018.....	57
Tabel 3.2 Perkembangan Permodalan Koperasi Karyawan BJB (Ziebar) tahun 2014–2018.	63
Tabel 3.3 Keadaan Debt to Equity Ratio Koperasi Karyawan BJB (Ziebar) Tahun 2014-2018.....	66
Tabel 3.4 Keadaan Debt to Total Assets Ratio Koperasi Karyawan BJB (Ziebar) Tahun 2014-2018.....	67
Tabel 3.5 Keadaan Return on Equity Koperasi Karyawan BJB (Ziebar) Tahun 2014-2018.	68
Tabel 3.6 Penerapan Definisi di Koperasi Karyawan BJB (Ziebar).	70
Tabel 3.7 Penerapan Prinsip-Prinsip Koperasi di Koperasi Karyawan BJB (Ziebar).	71
Tabel 3.8 Penerapan Nilai-Nilai Koperasi di Koperasi Karyawan BJB (Ziebar)	73
Tabel 4.1 Laporan Hasil Usaha Sebelum Pajak Koperasi Karyawan BJB (Ziebar) Tahun 2014-2018.....	76
Tabel 4.2 Perhitungan Pajak Penghasilan Badan Menurut Undang-Undang No. 36 Tahun 2008 Pada Koperasi Karyawan BJB (Ziebar)	78
Tabel 4.3 Depresiasi pada Koperasi Karyawan BJB (Ziebar) Tahun 2014-2018.....	79

Tabel 4.4 Laporan Hasil Usaha Sebelum Pajak Koperasi Karyawan BJB (Ziebar) Tanpa Depresiasi	81
Tabel 4.5 Pajak Penghasilan Badan Berdasarkan Undang-Undang No. 36 Tahun 2008 Pada Koperasi Karyawan BJB (Ziebar) Tahun 2014-2018 (Tanpa Depresiasi)	83
Tabel 4.6 Selisih Pajak Badan dan Sisa Hasil Usaha Setelah Pajak	84
Tabel 4.7 Perkembangan Cash Flow Koperasi Karyawan BJB (Ziebar) Tahun 2014- 2018	85
Tabel 4.8 Perkembangan Return on Investment Koperasi Karyawan BJB (Ziebar) Tahun 2014-2018.....	86
Tabel 4.9 Keterkaitan Pajak Pendapatan Badan Terhadap Perkembangan Cash Flow Koperasi Karyawan BJB (Ziebar) Tahun 2014-2018 Dengan Asumsi Perhitungan Pajak Tanpa Depresiasi	87
Tabel 4.10 Perkembangan Return on Investment Koperasi Karyawan BJB (Ziebar) Tahun 2014-2018 (Tanpa Depresiasi)	88
Tabel 4.11 Perkembangan Hutang, Modal sendiri, dan DER Koperasi Karyawan BJB (Ziebar) Tahun 2014-2018.....	89
Tabel 4.12 Laporan Hasil Usaha Sebelum Pajak Koperasi Karyawan BJB (Ziebar) Tahun 2014-2018.....	91
Tabel 4.13 Perhitungan Pajak Pendapatan Badan Menurut Undang-Undang No. 36 Tahun 2008 Pada Koperasi Karyawan BJB (Ziebar)	93
Tabel 4.14 Modal Sendiri, Total Utang dan Beban Bunga (Cost of Debt) Pada Koperasi Karyawan BJB (Ziebar) Tahun 2014-2018.....	95
Tabel 4.15 Laporan Hasil Usaha Sebelum Pajak Koperasi Karyawan BJB (Ziebar) Tanpa Bunga Pinjaman	96
Tabel 4.16 Perhitungan Pajak Pendapatan Badan Menurut Undang No. 36 Tahun 2008 Pada Koperasi Karyawan BJB (Ziebar) (Tanpa Bunga Pinjaman)	98
Tabel 4.17 Selisih Pajak Badan dan Sisa Hasil Usaha Setelah Pajak	99
Tabel 4.18 Perkembangan Modal Sendiri, SHU Setelah Pajak dan ROE Koperasi Karyawan BJB (Ziebar) Tahun 2014-2018 (Dengan Bunga)	100
Tabel 4.19 ROE Koperasi Karyawan BJB (Ziebar) Tahun 2014-2018 Setelah Asumsi Modal dipenuhi Oleh Modal Sendiri (Tanpa Bunga).....	102
Tabel 4.20 Selisih ROE Koperasi Karyawan BJB (Ziebar) dengan bunga dan tanpa bunga.	103
Tabel 4.21 Manfaat Ekonomi Tidak Langsung Bagi Anggota Tahun 2014-2018 dalam Perhitungan Hasil Usaha Pada Koperasi Karyawan BJB (Ziebar) dengan Bunga Pinjaman.....	105

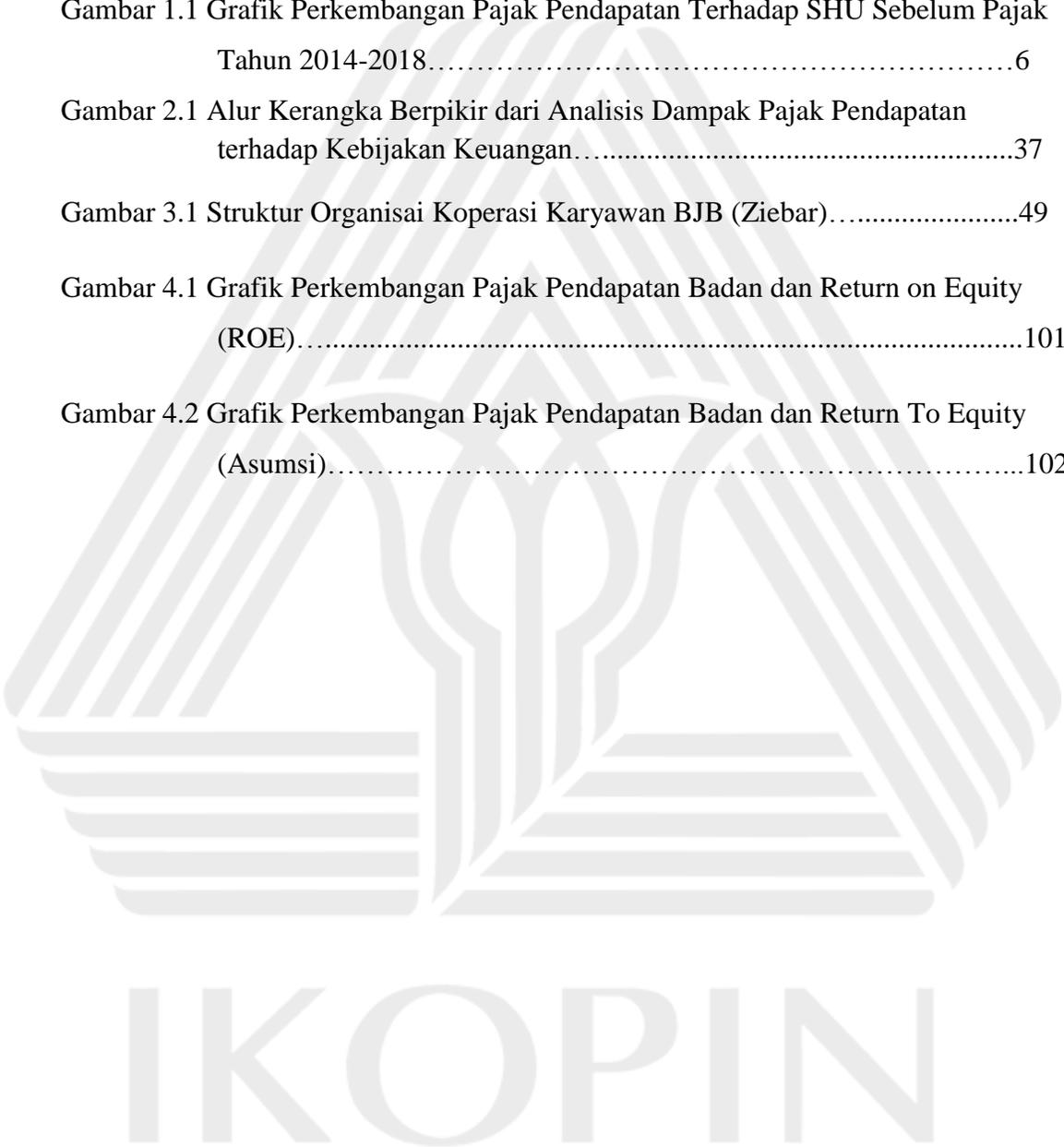
Tabel 4.22 Manfaat Ekonomi Tidak Langsung Bagi Anggota Tahun 2014-2018 dalam Perhitungan Hasil Usaha Pada Koperasi Karyawan BJB (Ziebar) dengan Asumsi Tanpa Bunga Pinjaman.....	107
Tabel 4.23 Manfaat Ekonomi Tidak Langsung Bagi Anggota Pada Koperasi Karyawan BJB (Ziebar).....	107



IKOPIN

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Grafik Perkembangan Pajak Pendapatan Terhadap SHU Sebelum Pajak Tahun 2014-2018.....	6
Gambar 2.1 Alur Kerangka Berpikir dari Analisis Dampak Pajak Pendapatan terhadap Kebijakan Keuangan.....	37
Gambar 3.1 Struktur Organisasi Koperasi Karyawan BJB (Ziebar).....	49
Gambar 4.1 Grafik Perkembangan Pajak Pendapatan Badan dan Return on Equity (ROE).....	101
Gambar 4.2 Grafik Perkembangan Pajak Pendapatan Badan dan Return To Equity (Asumsi).....	102



IKOPIN

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Penelitian

Di Indonesia ada 3 sektor usaha formal dalam perekonomian, yaitu Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Badan Usaha Milik Swasta (BUMS), dan Koperasi. Sebagai badan usaha pelaku ekonomi harus mampu untuk terus mengembangkan dirinya dan mampu untuk bersaing dengan pelaku ekonomi lainnya. Koperasi sebagai salah satu gerakan ekonomi rakyat diharapkan mampu memperkuat sistem perekonomian dimulai dari lapisan masyarakat terbawah. Sebagai pelaku usaha, Koperasi diharapkan dapat terus berkembang, mempunyai daya saing kuat dan bergerak aktif sebagai pendorong pertumbuhan ekonomi di Indonesia.

Koperasi merupakan organisasi ekonomi yang didirikan oleh orang-seorang yang bergabung karena memiliki tujuan yang sama berdasarkan asas kekeluargaan dan melakukan pekerjaannya secara gotong-royong. Koperasi beranggotakan orang-orang yang bergabung secara sukarela untuk mencapai tujuan tertentu yang bersifat sosial ekonomi.

Menurut Ramudi Arifin (2003), Koperasi adalah organisasi ekonomi modern yang menuntut pemikiran kosensial dan rasional karena koperasi hidup dilingkungan ekonomi yang dinamis dan terus bergerak maju yang semakin lama

semakin terbuka mengglobal dan menciptakan persaingan yang semakin tajam. Menurut Undang-Undang No.25 tahun 1992 tentang perkoperasian, Koperasi mempunyai fungsi dan berperan penting dalam perekonomian Indonesia, yaitu berperan dalam meningkatkan kesejahteraan ekonomi dan sosial, berperan aktif untuk memperkokoh perekonomian rakyat dengan mempertinggi kualitas kehidupan masyarakat, mewujudkan dan menjadi ketahanan perekonomian nasional yang berasaskan kekeluargaan dan demokrasi, juga mengembangkan kreativitas dan membangun jiwa organisasi.

Koperasi Karyawan BJB (Ziebar) merupakan salah satu koperasi yang ada di Indonesia yang beralamat di Buah Batu Bandung dengan Surat Keputusan Badan Hukum Nomor: 7887/BH/DK-1/1/1983 per tanggal 21 September 1983. Koperasi Karyawan BJB (Ziebar) merupakan koperasi yang didirikan sebagai wadah karyawan BJB dengan tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan anggota pada khususnya yang secara tidak langsung dapat berperan dalam menunjang kesejahteraan para karyawan BJB dan kemajuan perekonomian bangsa pada umumnya.

Menurut Bernhard Limbong (2010), ada beberapa jenis-jenis koperasi berdasarkan kepentingan anggotanya yaitu koperasi konsumsi, koperasi produksi, koperasi jasa, koperasi simpan pinjam, koperasi *single purpose*, dan koperasi *multi purpose*. Koperasi *single purpose* adalah koperasi yang aktivitasnya terdiri dari satu macam usaha, sedangkan koperasi *multi purpose* adalah koperasi yang didirikan oleh para anggotanya untuk dua atau lebih jenis usaha. Koperasi Karyawan BJB (Ziebar)

termasuk dalam jenis koperasi *multi purpose* karena mempunyai lebih dari satu unit usaha yang terdiri dari Unit Simpan Pinjam dan Unit Pengadaan Barang Promosi dan ATK. Terhitung sampai akhir tahun buku 2018 anggota berjumlah 3.292 anggota.

Koperasi Karyawan BJB (Ziebar) adalah koperasi primer karena beranggotakan orang seorang yang memiliki tujuan dan kepentingan ekonomi yang sama maka Koperasi Karyawan BJB “ZIEBAR” dapat dikategorikan sebagai koperasi primer. Anggota Koperasi Karyawan BJB (ZIEBAR) adalah orang-orang yang memiliki tujuan yang sama dan memenuhi persyaratan anggaran dasar koperasi primer. Karena anggota Koperasi Karyawan BJB “ZIEBAR” adalah para karyawan BJB dan yang dapat menjadi anggota koperasi hanyalah para karyawan BJB. Berdasarkan hal tersebut maka Koperasi Karyawan BJB “ZIEBAR” dapat digolongkan sebagai koperasi karyawan dan dapat dikategorikan sebagai koperasi fungsional karena berada dalam lingkungan karyawan BJB.

Setiap kegiatan usaha apapun bentuknya pada umumnya tujuan yang ingin dicapai adalah memperoleh laba termasuk Koperasi. Di Koperasi laba disebut sebagai Sisa Hasil Usaha (SHU). Walaupun tujuan utama koperasi bukan untuk mengejar Sisa Hasil Usaha akan tetapi peningkatan pendapatan setiap tahunnya akan menjadi target yang harus dicapai. Semakin besar laba bersih yang didapat maka semakin bertambah pula kemampuan koperasi untuk mengelola semua kegiatan yang ada.

Sisa Hasil Usaha juga merupakan bagian dari manfaat ekonomi anggota. Manfaat ekonomi yang diberikan anggota koperasi terbagi menjadi dua yaitu manfaat ekonomi langsung dan manfaat ekonomi tidak langsung. Menurut Hendar (2010), manfaat ekonomi langsung adalah manfaat yang dapat dirasakan secara langsung pada saat terjadinya transaksi melalui harga dan pelayanan, sedangkan manfaat ekonomi tidak langsung berupa pembagian Sisa Hasil Usaha bagian anggota pada akhir periode akuntansi.

Koperasi adalah badan usaha, maka koperasi memiliki kewajiban membayar pajak sejak koperasi didirikan atau bertempat kedudukan di Indonesia dan berakhir pada saat dibubarkan atau tidak lagi bertempat di Indonesia (Agus Setiawan, 2008). Berkaitan dengan hal tersebut, pajak dalam koperasi juga terkait dengan Sisa Hasil Usaha, karena pajak menjadi penambah beban dan pengurang Sisa Hasil Usaha. Dalam hal ini beban pajak nantinya dapat dilihat dari akun-akun yang menjadi objek pajak sesuai dengan ketentuan. Pajak merupakan pengetahuan yang harus dimiliki oleh setiap wajib pajak, penguasaan terhadap peraturan perpajakan bagi wajib pajak akan meningkatkan kepatuhan kewajiban perpajakan agar terhindar dari sanksi-sanksi yang berlaku dalam ketentuan umum perpajakan.

Menurut Rochmat Soemitro dalam Mardiasmo (2011), "Pajak adalah iuran rakyat kepada Negara berdasarkan Undang-Undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa timbal balik (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan,

dan digunakan untuk membayar pengeluaran umum”. Hal inilah yang menunjukkan bahwa Pajak adalah kewajiban yang harus dibayarkan.

Berdasarkan UU No. 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan Pasal 17 ayat (1) bagian b, tarif pajak yang dikenakan kepada badan adalah 25%. Besar tarif ini berlaku sejak tahun pajak 2010. Adapun ketentuan lain tentang PPh badan adalah dengan norma penghitungan penghasilan neto.

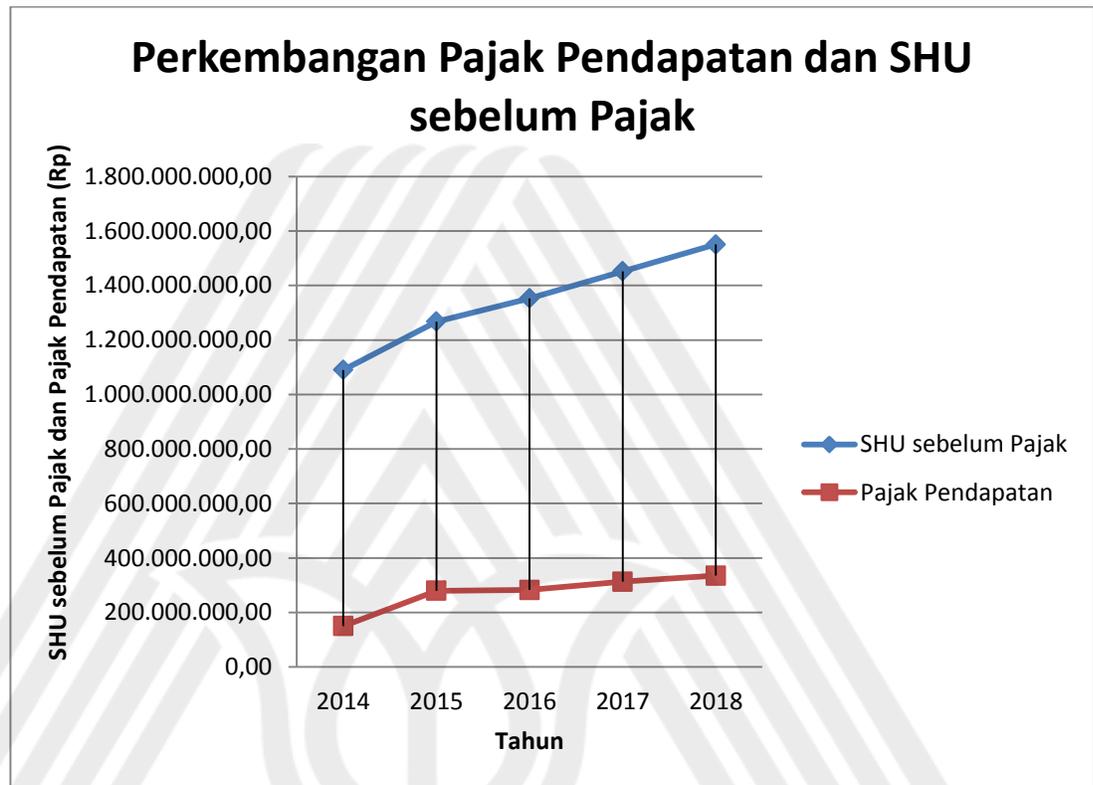
Berdasarkan ketentuan perpajakan yang berlaku, norma penghitungan penghasilan neto dibagi dalam 2 jenis berdasarkan jumlah pendapatan bruto, yaitu perhitungan pajak pendapatan bruto Rp. 4.800.000.000 hingga Rp. 50.000.000.000 dan perhitungan pajak peredaran bruto diatas Rp. 50.000.000.000.

Berikut adalah Pajak Penghasilan Badan dan SHU Sebelum Pajak pada Koperasi Karyawan BJB (Ziebar):

Tabel 1.1. SHU Sebelum Pajak dan Pajak Pendapatan tahun 2014-2018

TAHUN	SHU Sebelum Pajak (Rp)	Pajak (Rp)	Persentase Pajak (%)
2014	1.090.000.000,00	150.157.375,89	13,78
2015	1.267.430.155,96	279.585.161,76	22,06
2016	1.352.925.605,00	282.794.815,02	20,90
2017	1.452.338.191,96	312.955.477,66	21,55
2018	1.550.687.056,00	335.482.127,88	21,63

Sumber: Buku RAT Koperasi yang diolah



Gambar 1.1. Grafik Perkembangan Pajak Pendapatan Terhadap SHU Sebelum Pajak Tahun 2014-2018

Sumber: Buku RAT Koperasi yang diolah

Dari data diatas dapat dilihat perkembangan pajak pendapatan terhadap Sisa Hasil Usaha sebelum pajak selama 5 tahun. Perkembangan SHU Sebelum Pajak mengalami kenaikan terutama pada tahun 2015 sebesar Rp. 177.430.155,96. Sedangkan jika dilihat dari perkembangan pajak setiap tahunnya juga mengalami kenaikan, namun yang paling signifikan adalah kenaikan pajak pada tahun 2015 sebesar Rp. 129.427.785,87. Kenaikannya hampir 2 kali lipat dibanding jumlah pajak sebelumnya yaitu Rp. 150.157.375,89 menjadi Rp. 279.585.161,76.

Pajak adalah salah satu faktor yang akan berkaitan dengan kebijakan keuangan. Kebijakan keuangan memainkan peran penting pada koperasi karena kebijakan keuangan akan menghasilkan keputusan pendanaan selanjutnya. Menurut Brigham dan Houston (2001), leverage keuangan (financial leverage) merupakan suatu ukuran yang menunjukkan sampai sejauh pendanaan digunakan dalam struktur modal dimana kebijakan leverage keuangan merupakan kebijakan yang diambil oleh pihak manajemen dalam rangka memperoleh sumber pembiayaan bagi perusahaan sehingga dapat digunakan untuk membiayai aktivitas operasional perusahaan.

Kebijakan keuangan terdiri dari 3 komponen yaitu keputusan investasi, keputusan pendanaan dan kebijakan deviden yang dalam koperasi deviden berupa pembagian Sisa Hasil Usaha. Keputusan investasi dapat dilihat dari sisi kiri neraca dan dapat dilihat dengan menghitung depresiasi, *Cash Flow* dan menggunakan rasio *Return on Investment*. Keputusan pendanaan dapat dilihat dengan melihat bunga pinjaman dan menghitung struktur modal. Kebijakan pembagian Sisa Hasil Usaha dapat dilihat dari profitabilitas perusahaan.

Irham Fahmi (2011) menyatakan bahwa depresiasi adalah penurunan nilai yang terjadi secara berangsur-angsur dari waktu ke waktu. Penurunan nilai ini terjadi pada berbagai jenis barang, seperti gedung, kendaraan, peralatan kantor, dan berbagai inventaris lainnya. Depresiasi merupakan biaya yang berpengaruh terhadap pajak pendapatan. Ketentuan tentang depresiasi terdapat dalam Undang-Undang Pajak Penghasilan. *Cash Flow* adalah laporan arus kas yang berisi tentang penerimaan dan

pengeluaran kas pada periode tertentu dan *Return on Investment* adalah rasio untuk melihat jumlah keuntungan ataupun kerugian yang diperoleh.

Warsono (2003) berpendapat bahwa ada 2 indikator struktur modal, yaitu rasio hutang modal dan rasio hutang. Rasio hutang modal adalah perbandingan total hutang dengan modal sendiri yang dapat dihitung dengan *Debt to total Equity Ratio* (DER). Sedangkan rasio hutang merupakan perbandingan antara total utang dengan total aktiva yang dapat dihitung dengan *Debt to total Assets Ratio* (DAR). *Debt to total Assets Ratio* (DAR) digunakan untuk mengukur seberapa besar jumlah aktiva atau total aset perusahaan dibiayai dengan total hutang. Adapun aset mengalami penyusutan atau depresiasi yang juga harus diperhitungkan.

Struktur modal itu sendiri merupakan cara perusahaan dapat menggunakan banyak sumber dana untuk membiayai operasi dan pertumbuhannya. Penentuan proporsi sumber campuran seperti utang dan ekuitas dalam kinerja perusahaan sangat dipertimbangkan.

Kombinasi modal sendiri dengan modal pinjaman pada berbagai koperasi memiliki pola yang berbeda-beda. Pada koperasi yang memiliki modal pinjaman yang lebih besar daripada modal sendiri ataupun sebaliknya. Hal tersebut sepintas merupakan hal yang wajar, namun pada dasarnya merupakan permasalahan keputusan pendanaan (struktur modal) yang akan memberi pengaruh terhadap profitabilitas dan nilai perusahaan koperasi. Hal ini sesuai dengan pendapat

Modigliani dan Miller dalam Eugene F. Brigham dan Joel F. Houston (2001) tentang pentingnya modal pinjaman dalam struktur modal perusahaan. Modal pinjaman dapat digunakan untuk menghemat pajak, karena bunga yang dihasilkan atas penggunaan modal pinjaman bisa dipakai sebagai pengurang pajak. Dengan demikian perlindungan pajak yang diperoleh semakin besar jika penggunaan utang dan beban bunga semakin besar pula.

Dari keterangan diatas dapat ditarik kesimpulan tentang masalah yang berkaitan dengan kebijakan keuangan pada Koperasi Karyawan BJB (ZIEBAR). Masalah ini akan terkait terhadap struktur modal, karena besaran utang itu dapat menjadi pengurang pajak di koperasi yang juga berhubungan dengan bunga pinjaman. Perkembangan Pajak Pendapatan juga memiliki dampak terhadap kebijakan depresiasi karena penyusutan aset tetap akan menjadi unsur biaya pengurang penghasilan bruto. Penelitian ini berguna untuk memberikan masukan berdasarkan hasil penelitian dan memperluas landasan teoritis dengan melakukan survey di lapangan.

Dari pernyataan tersebut maka akan dilakukan analisis data yang diperoleh dengan menggunakan analisis deskriptif. Saifuddin Azwar (2014) menjelaskan bahwa analisis deskriptif bertujuan untuk memberikan deskripsi mengenai subjek yang diteliti dan tidak dimaksudkan untuk pengujian hipotesis. Analisis ini dilakukan dengan dengan membahas data dengan menyeluruh berdasarkan kenyataan dan dihubungkan dengan teori-teori yang ada untuk mendukung dalam pembahasan ini

sehingga diperoleh suatu kesimpulan. Hal ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan sebelumnya oleh Afifah Tsuraya dan Nur Diana (2016), yang menyatakan bahwa “faktor pajak berpengaruh terhadap kebijakan keuangan”. Adapun menurut penelitian yang dilakukan oleh Oria Sativa Lutfi (2012) menyatakan bahwa “Pajak Penghasilan, beban bunga, dan depresiasi berpengaruh terhadap kebijakan *leverage* keuangan”.

Berdasarkan hal tersebut penulis bertujuan melakukan penelitian di Koperasi Karyawan BJB (ZIEBAR) dengan judul: **“Analisis Pajak Pendapatan Badan dan Kaitannya dengan Kebijakan Keuangan Koperasi dan Manfaat Ekonomi Tidak Langsung pada Koperasi Karyawan BJB (ZIEBAR)”**

1.2. Identifikasi Masalah Penelitian

Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan pada latar belakang, maka Peneliti mengidentifikasi beberapa permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimana keterkaitan Pajak Pendapatan Badan dengan keputusan investasi
2. Bagaimana keterkaitan Pajak Pendapatan Badan dengan keputusan pendanaan
3. Bagaimana keterkaitan Pajak Pendapatan Badan dengan kebijakan pembagian Sisa Hasil Usaha
4. Bagaimana keterkaitan Pajak Pendapatan Badan dengan Manfaat Ekonomi Tidak Langsung di Koperasi Karyawan BJB (Ziebar)

1.3. Maksud dan Tujuan Penelitian

Maksud dari Penelitian ini adalah untuk melihat pajak pendapatan badan dan dampaknya pada kebijakan keuangan sehingga pihak manajemen dapat menentukan keputusan yang lebih tepat dan sesuai. Adapun tujuan yang ingin diperoleh dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui:

1. Mendeskripsikan keterkaitan pajak pendapatan badan dengan keputusan investasi
2. Mendeskripsikan keterkaitan pajak pendapatan badan dengan keputusan pendanaan
3. Mendeskripsikan keterkaitan pajak pendapatan badan dengan kebijakan pembagian Sisa Hasil Usaha
4. Mendeskripsikan keterkaitan pajak pendapatan badan dengan Manfaat Ekonomi Tidak Langsung

1.4. Kegunaan Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik kegunaan teoritis maupun kegunaan praktis.

1.4.1. Kegunaan Teoritis

Sebagai masukan untuk peneliti dalam menambah pengetahuan, dimana hasil penelitian dapat memberikan sumbangan yang bermanfaat bagi pengembangan ilmu manajemen keuangan yang berwawasan koperasi dan data-data empirik dari penelitian yang diteliti. Maka dengan hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran untuk penelitian selanjutnya.

1.4.2. Kegunaan Praktis

Bagi Koperasi Karyawan BJB (Ziebar), hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna sebagai informasi dan bahan pertimbangan, khususnya bagi pengurus dan manajemen untuk melakukan dan menganalisis pajak pendapatan dan dampaknya pada kebijakan keuangan dalam upaya memberikan masukan untuk merumuskan kebijakan keuangan koperasi di masa yang akan datang. Sedangkan bagi koperasi secara umum, hasil penelitian ini diharapkan dapat membantu dalam pengembangan perkoperasian Indonesia.



IKOPIN

BAB V

SIMPULAN DAN SARAN

5.1. Simpulan

Berdasarkan pada hasil penelitian dan pembahasan pada bab yang telah dibahas sebelumnya, maka dapat dari penelitian ini dapat disimpulkan berbagai hal sebagai berikut:

1. Berdasarkan penelitian yang dilakukan dapat dilihat bahwa dalam aktiva tetap ada aset yang diperhitungkan beban depresiasinya sebagai beban *non cash* dan depresiasi akan mengurangi Sisa Hasil Usaha yang otomatis mengurangi pajak. Jika Perhitungan Hasil Usaha diasumsikan tanpa depresiasi, maka pajak akan semakin meningkat. Perubahan tersebut juga dapat merubah *Cash Flow* karena *Cash Flow* merupakan aliran kas masuk dengan cara menghitung penambahan dari Sisa Hasil Usaha setelah pajak dan Depresiasi. Maka dapat disimpulkan bahwa depresiasi dapat menjadi alat dalam mengefisiensikan pajak
2. Kaitan Pajak saling dengan keputusan pendanaan dapat dilihat jika didalamnya terdapat beban bunga pinjaman atau *Cost of Debt* dari penggunaan hutang, maka saat bunga pinjaman naik pajak akan turun yang disebabkan oleh turunnya Sisa Hasil Usaha. Sedangkan jika modal dipenuhi oleh modal sendiri maka bunga pinjaman akan hilang, Sisa Hasil Usaha akan naik dan pajak pendapatan juga naik.

3. Pada saat hutang diasumsikan hilang dan modal dipenuhi oleh modal sendiri, hal ini sangat berpengaruh terhadap kebijakan pembagian Sisa Hasil Usaha yang dapat dilihat dari profitabilitas koperasi. Sisa Hasil Usaha di koperasi terus mengalami kenaikan setiap tahunnya dan berdampak dengan pajak yang juga semakin meningkat.
4. Manfaat ekonomi tidak langsung berkaitan pada perubahan pajak pendapatan badan setelah hutang diasumsikan hilang dan modal dipenuhi oleh modal sendiri. Pada manfaat ekonomi tidak langsung dampak pajak akan sangat terlihat karena adanya perubahan pada Sisa Hasil Usaha. Hal ini menunjukkan bahwa pajak pendapatan badan berdampak pada kebijakan keuangan dan juga berdampak pada manfaat ekonomi tidak langsung.

5.2. Saran-saran

Berdasarkan hasil penelitian maka ada beberapa hal yang perlu untuk dilakukan perbaikan sesuai dengan hasil penelitian yang dilakukan, maka penulis memberikan saran sebagai berikut:

1. Koperasi membuat pertimbangan keputusan investasi melalui penambahan aset dan menggunakan depresiasi sebagai alat untuk mengefisiensikan pajak untuk kedepannya.
2. Koperasi membuat gambaran nilai taksiran beban pajak koperasi jika menggunakan hutang lebih banyak ataupun menggunakan modal sendiri lebih banyak sehingga kedepannya koperasi dapat merumuskan rencana anggaran dalam mengefisiensi beban pajak pendapatan

koperasi dan memperkirakan nilai beban pajak yang akan timbul dari penambahan atau pengurangan hutang atau modal asing.

3. Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan dasar untuk penelitian selanjutnya dalam hal-hal yang belum dibahas atau diteliti pada penelitian ini.



IKOPIN

DAFTAR PUSTAKA

- Agus Setiawan. 2004. *Menghitung PPh Badan dengan Undang-Undang Pajak Terbaru*. Yogyakarta: Andi.
- Anastasia Diana dan Lilis Setawati. 2004. *Perpajakan Indonesia*. Yogyakarta: Andi.
- Arifin Sitio dan Halomoan Tamba. 2001. *Koperasi: teori dan praktik*. Jakarta: Erlangga.
- Bernhard Limbong. 2010. *Pengusaha Koperasi*. Jakarta: Margaretha Pustaka.
- Burhanuddin. 2013. *Koperasi Syariah dan Pengaturannya di Indonesia*. Malang: UIN-Maliki Press.
- Brigham, F. Eugene dan Joel F Houston. 2001. *Manajemen Keuangan*. Edisi Kedelapan. Buku 2. Jakarta: Erlangga.
- Hendar. 2010. *Manajemen Perusahaan koperasi*, Jakarta: Erlangga.
- Hendrojogi. 2002. *Koperasi Azas-Azas Teori dan Praktek Edisi Revisi*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Ibnoe Soedjono. 2001. *Jatidiri Koperasi ICA Co-operative Identity Statement Prinsip-Prinsip Koperasi*. Jakarta: LSP21.
- Irham Fahmi. 2017. *Analisis Laporan Keuangan*. Bandung: Alfabeta.
- Jeni Susyanti, Ahmad Dalan. 2015. *Perpajakan Untuk Praktisi dan Akademisi*. Jawa Timur: Empat Dua.
- Kasmir. 2008. *Analisis Laporan Keuangan*. edisi revisi. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.

Kasmir. 2010. *Pengantar Manajemen Keuangan*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.

Mardiasmo. 2011. *Perpajakan*. Edisi revisi. Yogyakarta: Andi.

Ramudi Ariffin. 2003. *Perkembangan Koperasi*. Sumedang: IKOPIN PRESS.

Ramudi Ariffin. 2013. *Koperasi Sebagai Perusahaan*. Sumedang: IKOPIN PRESS.

Rusidi dan Ami Purnamawati. 2015. *Metodologi penelitian, Sistematika Usulan Penelitian dan Skripsi*. Sumedang: IKOPIN.

S. Munawir. 2004. *Analisis Laporan Keuangan*. Yogyakarta: Edisi Ke-4. Liberty.

Saifuddin Awar. 2014. *Metode Penelitian*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Siti Resmi. 2008. *Perpajakan: Teori dan Kasus*. Edisi Keempat. Jakarta: Salemba Grup.

Susan Irawati. 2006. *Manajemen Keuangan*. Bandung: PUSTAKA.

Sutrisno. 2003. *Manajemen Keuangan (Teori, Konsep dan Aplikasi)*. Yogyakarta: Ekonisia.

Undang-Undang No. 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian.

Warsono. 2003. *Manajemen Keuangan Perusahaan*. Jilid 1. Malang: Bayu Media Publishing.

Referensi:

Laporan Pertanggungjawaban Pengurus dan Pengawas. 2014. Primer Koperasi Karyawan BJB (Ziebar) Buah Batu. Kota Bandung.

Laporan Pertanggungjawaban Pengurus dan Pengawas. 2015. Primer Koperasi Karyawan BJB (Ziebar) Buah Batu. Kota Bandung.

Laporan Pertanggungjawaban Pengurus dan Pengawas. 2016. Primer Koperasi Karyawan BJB (Ziebar) Buah Batu. Kota Bandung.

Laporan Pertanggungjawaban Pengurus dan Pengawas. 2017. Primer Koperasi Karyawan BJB (Ziebar) Buah Batu. Kota Bandung.

Laporan Pertanggungjawaban Pengurus dan Pengawas. 2018. Primer Koperasi Karyawan BJB (Ziebar) Buah Batu. Kota Bandung.

Jurnal:

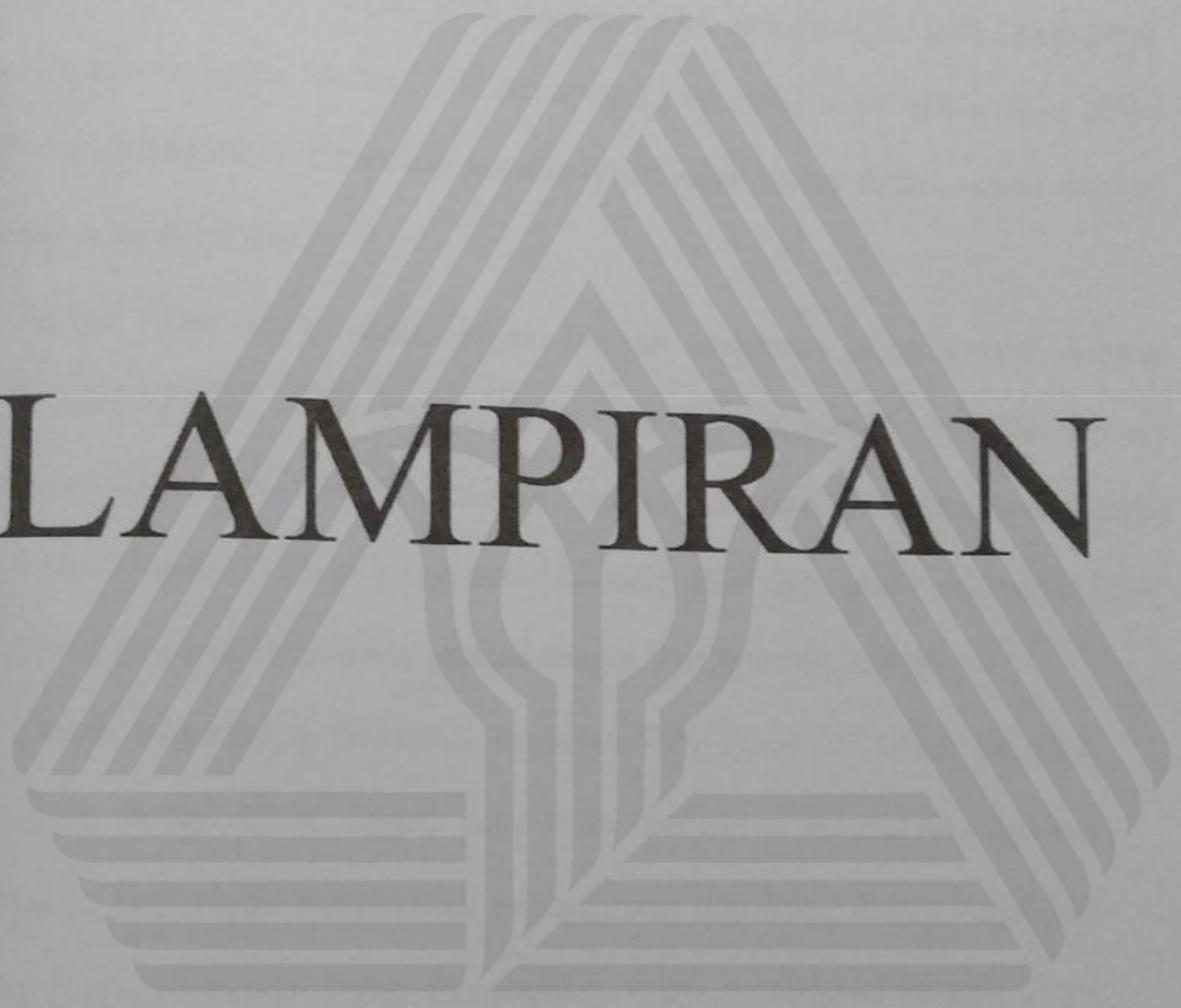
Afifah Tsuraya dan Nur Diana. 2016. *Pengaruh Faktor Pajak dan Faktor non Pajak Terhadap Kebijakan Keuangan Pada Perusahaan Manufaktur*. Universitas Islam Malang.

Luh Noviana Sekar Utami. 2017. *Pengaruh Tarif Pajak, Profitabilitas, Likuiditas, dan Ukuran Perusahaan Terhadap Struktur Modal Perusahaan*. Jurnal Akuntansi. e-ISSN 2302,8556.

Oriza Sativa Lutfi. 2012. *Pengaruh Pajak Penghasilan, Beban Pajak, Depresiasi, dan Kebijakan Leverage Pada Perusahaan Manufaktur*. Universitas Negeri Yogyakarta.

Sunanto. 2013. *Analisis Perhitungan Pajak Penghasilan Menurut Undang-Undang PPh Nomor 36 Tahun 2008 Pada Koperasi Pegawai Negeri (KPN) Harapan Jaya Sekayu*. Jurnal Akuntansi Politeknik Sekayu vol. 3, no 2, e-ISSN 2407,2128.

Zulia Hanum. 2017. *Analisis Akuntansi Pajak Penghasilan Pasal 25 Badan*. Jurnal Kultura vol. 8, no 1, e-ISSN 1411,0229.



LAMPIRAN

IKOPIN

Tarif PPh Badan

Untuk mendapatkan nominal PPh badan, dapat dihitung dengan mengalikan Penghasilan Kena Pajak dengan tarif pajak yang berlaku. Berdasarkan Pasal 17 ayat (1) bagian b UU No. 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan, tarif pajak yang dikenakan kepada badan adalah 25%. Besar tarif ini berlaku sejak tahun pajak 2010. Tarif lebih rendah dapat dikenakan kepada wajib pajak badan dalam negeri dengan ketentuan sebagai berikut:

Wajib Pajak badan dalam negeri dengan peredaran bruto sampai dengan Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah) mendapat fasilitas berupa pengurangan tarif sebesar 50% (lima puluh persen) dari tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf b dan ayat (2a) yang dikenakan atas Penghasilan Kena Pajak dari bagian peredaran bruto sampai dengan Rp4.800.000.000,00

Untuk menghitung besarnya angsuran PPh Pasal 25 tahun berjalan, Wajib Pajak badan dalam negeri yang telah memenuhi persyaratan fasilitas pengurangan tarif Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31E ayat (1) Undang-Undang Pajak Penghasilan wajib menggunakan tarif Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31E ayat (1) Undang-Undang Pajak Penghasilan.

1. Perhitungan PPh Badan dengan pendapatan bruto Rp. 4,8M-50M

(a) = 4,8M : Pendapatan bruto x PKP
(b) = PKP - (a)
PKP Memperoleh fasilitas = $50 \times 25\% \times (a)$
PKP Tidak Memperoleh Fasilitas = $25\% \times (b)$

2. Perhitungan PPh Badan dengan pendapatan bruto Rp. 4,8M-50M

(a) = 4,8M : Pendapatan bruto x PKP
(b) = PKP - (a)
PKP Memperoleh fasilitas = 25% x (a)
PKP Tidak Memperoleh Fasilitas = 25% x (b)

Ketentuan Perhitungan Pasal 31E:

a. Pendapatan bruto lebih dari Rp 4.800.000.000,- sampai dengan Rp 50.000.000.000,- PPh terutang

50% x 25% x PKP dari bagian pendapatan bruto yang memperoleh fasilitas	+	25% x PKP dari bagian pendapatan bruto yang tidak memperoleh fasilitas
--	---	--

Tarif PPh Badan dengan pendapatan 4,8M-50M ditentukan oleh UU No. 36 Tahun 2008 Pasal 17 bagian b ayat (1) tentang Pajak Penghasilan sebesar 25% dari PKP dan mendapatkan pengurangan 50% pada PKP dari bagian yang memperoleh fasilitas yang disesuaikan dengan Pasal 31E.

b. Peredaran bruto lebih dari Rp 50.000.000.000,- PPh terutang :

25% x PKP dari bagian pendapatan bruto yang memperoleh fasilitas	+	25% x PKP dari bagian pendapatan bruto yang tidak memperoleh fasilitas
--	---	--

Tarif PPh Badan dengan pendapatan 4,8M-50M ditentukan oleh UU No. 36 Tahun 2008 Pasal 17 bagian b ayat (1) tentang Pajak Penghasilan sebesar 25% dari PKP tanpa mendapat pengurangan pada PKP dari bagian yang memperoleh fasilitas yang disesuaikan dengan Pasal 31E.



KOPERASI KARYAWAN BANK BJB ZIEBAR
NERACA
31 DESEMBER 2015 DAN 2014

(Dinyatakan Dalam Rupiah)

	Catatan	2015	2014
ASET			
Aset Lancar			
Kas dan Setara Kas	4	2,929,165,511.61	1,796,630,327.29
Piutang Usaha	5	979,214,444.00	895,549,038.66
Piutang Pinjaman Anggota	6	15,044,458,651.00	15,481,351,839.34
Piutang Lain-lain	7	705,000,000.00	619,512,119.09
Persediaan	8	574,599,165.00	436,502,608.00
Biaya Dibayar Dimuka	9	96,074,750.00	52,828,657.50
Pajak Dibayar Dimuka	10	759,800,323.00	21,423,272.29
Properti Investasi	11	79,318,750.00	-
Jumlah aset lancar		21,167,631,594.61	19,303,797,862.17
Aset Tidak Lancar			
Investasi	12	1,334,000,606.00	1,334,900,606.00
Aset Tetap	13	2,019,825,542.08	2,277,594,182.83
Aset Lain-lain	14	3,719,521,893.00	33,669,784.00
Jumlah aset tidak lancar		7,073,348,041.08	3,646,164,572.83
JUMLAH ASET		28,240,979,635.69	22,949,962,435.00

Lihat catatan atas laporan keuangan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan

KOPERASI KARYAWAN BANK BJB ZIEBAR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2015 dengan angka perbandingan untuk tahun 2014
(Dinyatakan Dalam Rupiah)

	2015	2014
27 SHU Tahun Berjalan		
Akun ini terdiri dari:		
- Saldo Sisa Hasil Usaha	-	-
- Sisa Hasil Usaha Tahun Berjalan	987,844,994	-
28 PENDAPATAN		
Akun ini terdiri dari:		
28.1 Pendapatan	3,175,869,824.00	2,756,518,537.05
Rincian pendapatan adalah sebagai berikut:		
- Pinjaman Uang	2,804,623,136.34	1,575,361,080.45
- Provisi	227,978,000.00	165,445,000.00
- Pendapatan Lembur BM	-	12,910,002.00
- Pendapatan Gaji BM	-	874,786,927.00
- Pendapatan Cemical	-	17,667,305.80
- Pendapatan Hygine Service	-	65,550,330.80
- Pendapatan BJB Cabang Utama	-	5,938,865.00
- Sewa Kendaraan	-	38,859,026.00
- Pendapatan Jasa Kredit Barang	141,470,487.66	-
- Pendapatan Materai Pinjaman	1,798,200.00	-
28.2 Beban Pokok	1,927,527,863.00	1,454,833,596.00
Beban Pokok terdiri dari :		
- Beban Gaji BM	-	79,000,000.00
- Beban Honor Pengelola Koperasi	766,875,900.00	578,598,016.00
- Beban Imbalan Kerja	507,251,000.00	337,392,985.00
- Beban uang makan pengelola	122,670,000.00	107,890,000.00
- Beban Jasa Pengurus	168,000,000.00	115,850,000.00
- Beban Jasa Pengawas	36,000,000.00	25,850,000.00
- Tunjangan Jamsostek	92,389,850.00	7,063,680.00
- Beban Seragam Kantor	128,981,100.00	94,200,000.00
- Beban Telpon	38,241,513.00	32,261,226.00
- Beban Listrik	22,708,500.00	34,527,689.00
- Beban Tunjangan DPLK	43,200,000.00	41,350,000.00
- Beban Koran	1,210,000.00	850,000.00
29 PENDAPATAN DARI NON - ANGGOTA		
Akun ini terdiri dari :		
29.1 Pendapatan barang dari non Anggota	15,939,293,782.00	1,286,324,572.71
Akun ini terdiri dari :		
- Barang Promosi	15,003,297,971.00	722,392,940.00
- Barang ATK	935,995,811.00	233,455,369.00
- Barang Lainnya	-	330,476,263.71



KOPERASI KARYAWAN BANK BJB ZIEBAR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2015 dengan angka perbandingan untuk tahun 2014
(Dinyatakan Dalam Rupiah)

	2015	2014
29.2 Beban Pokok	14,007,077,162.00	-
Beban Pokok terdiri dari :		
Beban Pokok Barang Promosi :		
Persediaan Awal	344,995,158.00	-
Pembelian	13,294,984,459.00	-
Persediaan Barang Promosi	449,460,050.00	-
Beban Pokok Barang Promosi	13,190,519,567.00	-
Beban Pokok Barang ATK :		
awal	91,507,450.00	-
pembelian	850,027,260.00	-
persediaan akhir	124,977,115.00	-
Beban Pokok Barang ATK	816,557,595.00	-
30 BEBAN USAHA	2,960,322,385.83	2,787,333,742.67
Akun ini terdiri dari		
Beban Usaha	2,960,322,385.83	2,787,333,742.67
Rincian beban usaha adalah sebagai berikut:		
- Biaya Provisi Kredit BRI Syariah	-	9,892,500.00
- Beban Sewa Kendaraan	68,820,300.00	1,700,000.00
- Beban Pelatihan Tenaga Outsourcing	-	7,965,312.00
- Beban Menara Bank BJB BM	-	5,621,550.00
- Beban Peralatan Kerja BM	-	5,270,000.00
- Beban Operasional BM & HK	-	75,776,507.00
- Beban Material dan Beban Pos BM	1,979,700.00	6,895,000.00
- Beban Tarining BM	-	192,000.00
- Biaya Bahan Kerja BM	-	492,500.00
- Pajak PPh Pasal 21 BM	-	3,820,693.00
Barang Promosi	7,302,772.00	24,398,000.00
- Beban Materai dan Pos	9,552,000.00	20,071,137.00
- Beban Pengiriman paket ke cabang-cabang	48,743,752.00	38,489,557.00
- Beban Transportasi/perjalanan dinas	11,574,050.00	29,308,165.00
- Beban THR Pengurus	-	116,286,000.00
- Beban Lembur	49,418,414.00	43,544,933.00
- Beban Tunjangan Pendidikan	-	142,917,000.00
- Beban Kurban	51,051,058.00	5,000,000.00
- Beban Jamuan Tamu	20,073,625.00	27,418,425.00
- Beban Bensin	20,039,501.00	32,311,330.00
- Beban THR Anggota	877,887,500.00	1,279,113,400.00
- Beban Alat Tulis Kantor	47,821,890.00	49,945,740.00
- Beban Sewa Kantor	-	4,500,000.00
- Beban Asuransi Anggota	75,556,250.00	109,150,000.00
- Beban Iptw	70,000,000	-
- Beban Tunjangan Perusahaan	-	3,100,000.00
- Beban Audit	22,955,098.00	18,000,000.00
- Beban PPh 21	-	13,679,252.00
- Beban Dapur	12,982,450.00	13,901,690.00
- Beban Pemeliharaan Program	1,950,000.00	2,785,000.00
- Beban Umum Lainnya	58,300,930.02	44,018,181.00
- Sewa Laptop	7,500,000.00	-
- Jaminan Pelaksanaan	3,060,888.00	-
- Renovasi Gudang Jl. Kejaksaan	6,150,000.00	-
- Provisi Pinjaman Bank BJB	20,000,000.00	-
- Beban Rapat	7,341,308.00	31,183,100.00



**KOPERASI KARYAWAN BANK BJB ZIEBAR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2015 dengan angka perbandingan untuk tahun 2014
(Dinyatakan Dalam Rupiah)

BEBAN USAHA (Lanjutan)			
- Beban Parkir		5,573,992.00	9,032,800.00
- Beban Rekreasi		367,508,355.23	171,000,000.00
- Beban Grand Opening		-	34,110,000.00
- Beban Jasa Legal		8,250,000.00	750,000.00
- Beban Keperluan Kantor		17,346,874.00	35,402,320.00
- Beban Penyusutan Ass Anggota		-	9,959,452.00
- Beban Konsultan Kelembagaan		-	1,000,000.00
- Beban Tunjangan Pulsa		10,800,000.00	12,600,000.00
- Beban Pemeliharaan Kendaraan		6,766,500.00	11,978,615.00
- Beban Asuransi Kendaraan		14,099,653.00	7,885,732.50
- Beban Pajak PBB / Pajak Lainnya		766,575.00	193,229.00
- Beban Pajak		-	1,356,198.00
- Beban Sewa Setup Aplikasi Bcore		55,049,961.00	39,282,498.00
- Beban Notaris		13,600,000.00	34,650,000.00
- Beban Perpanjangan STNK		8,372,500.00	545,200.00
- Beban Renovasi Lantai Dak		-	1,100,000.00
- Beban Amortisasi Pelaksanaan		15,304,440.00	18,365,328.00
- Beban Non Operasional		70,086,504.00	6,642,000.00
- Biaya Bunga Kredit BRI Syariah dan Bank BJB		292,368,075.83	58,289,007.00
- Biaya Penyusutan		182,401,796.75	166,444,391.17
- Tunjangan Hari Raya		162,357,900.00	-
- Olah Raga		3,805,000.00	-
- Pos		4,752,605.00	-
- Pengadaan Seragam BJB		208,187,668.00	-
- Amortisasi Penyewaan Mobil		12,862,500.00	-
		2015	2014
31 - BEBAN PERKOPERASIAN		237,506,020.00	-
Rincian beban perkoperasian adalah sebagai berikut :			
- Beban Rapat Anggota		232,306,020.00	-
- Beban Hari Koperasi		5,200,000.00	-
32 - Pendapatan dan Beban Lain-lain			
Akun ini terdiri dari:			
		2015	2014
32 a Pendapatan Lain-lain		1,287,562,222.73	1,302,799,954.29
Rincian pendapatan lain-lain adalah sebagai berikut:			
- Pendapatan Jasa Giro		16,380,476.02	19,007,949.95
- Pendapatan Bunga Deposito		-	484,932.00
- Pendapatan Non Operasional		-	1,045,184,069.00
- Pendapatan Umum Lainnya		-	127,428,350.34
- Pendapatan Jasa Lainnya		-	1,806,453.00
- Pendapatan Jasa Lainnya		-	890,000.00
- Pendapatan Materai Pinjaman		-	1,078,200.00
- Pendapatan Sewa Gedung Kantor Koperasi		54,000,000.00	90,000,000.00
- Pendapatan Sewa Kendaraan Grand Max		97,130,000.00	9,080,000.00
- Pendapatan Jasa Staf Ilegal		-	7,840,000.00
- Pendapatan Jasa Legal dari PT. Ziebar Indonesia		15,295,840.00	-
- Deviden PT. Artdeco		56,927,931.00	-
- Deviden PT. Ziebar Indonesia		363,359,298.00	-
- Penggantian Biaya Perijinan PT. Ziebar Indonesia		9,500,000.00	-
- Pendapatan Diskon Pembelian TV		500,000.00	-
- Penggantian Biaya PT. Ziebar Indonesia		14,591,158.00	-
- Lain-lain		924,067.71	-
- Penggantian Biaya Pengiriman dokumen USP ke Anggota		9,824,000.00	-

KOPERASI KARYAWAN BANK BJB ZIEBAR

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2015 dengan angka perbandingan untuk tahun 2014
(Dinyatakan Dalam Rupiah)

Pendapatan Lain-lain (lanjutan)		
- Penggantian Ongkos kirim Barang ke Cabang	27,672,600.00	-
- Sewa Mesin Fotocopy	523,500.00	-
- Materai	100,900.00	-
- Bazaar Ramadhan	1,876,000.00	-
- Fee Pengadaan Pakaian Dinas Bank BJB	541,456,363.00	-
- Kesalahan atas perhitungan Akm Penyusutan & Beban Penyusutan	77,500,089.00	-
	2015	2014
32 b Beban Lain-lain	2,862,241.94	13,475,702.08
Rincian beban lain-lain adalah sebagai berikut:		
- Administrasi Bank	2,862,241.94	13,475,702.08
	2015	2014
33 BEBAN PAJAK PENGHASILAN	279,585,161.76	136,250,000.00
Penghasilan Kena Pajak	1,267,430,155.96	1,090,000,000.00
PKP dari bagian peredaran bruto tidak memperoleh fasilitas PKP dikurang (Rp4.800.000.000,-/Peredaran Bruto)* PKP		
Pajak Penghasilan Terutang		
50% x 25% x (Rp4.800.000.000/Peredaran Bruto)* PKP	279,585,161.76	150,157,375.89
Fasilitas Pajak		
25% X tidak memperoleh fasilitas		

IKOPIN



KOPERASI KARYAWAN BANK BJB ZIEBAR
NERACA

31 DESEMBER 2017 DAN 2016

(Dinyatakan Dalam Rupiah)

	Catatan	2017	2016
ASET			
Aset Lancar			
Kas dan Setara Kas	3	5,384,145,358	1,381,441,411
Piutang Usaha	4	2,164,339,979	1,309,158,746
Piutang Pinjaman Anggota	5	24,001,305,764	22,369,196,507
Piutang Lain-lain	6	-	-
Persediaan	6	576,861,602	456,970,256
Biaya Dibayar Dimuka	7	260,099,750	250,659,509
Pajak Dibayar Dimuka	8	17,633,633	21,947,264
Properti Investasi	9	52,521,875	65,384,375
Jumlah aset lancar		32,456,907,961	25,854,758,068
Aset Tidak Lancar			
Investasi	10	3,134,000,606	1,334,000,606
Aset Tetap	11	1,836,697,700	1,865,770,670
Aset Lain-lain	12	7,098,094,175	3,204,355,777
Jumlah aset tidak lancar		12,068,792,481	6,404,127,053
JUMLAH ASET		44,525,700,442	32,258,885,121

Lihat catatan atas laporan keuangan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan

IKOPIN

KOPERASI KARYAWAN BANK BJB ZIEBAR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2017 dengan angka perbandingan untuk tahun 2016
(Dinyatakan Dalam Rupiah)

		2017	2016
25	PENDAPATAN		
	Akun ini terdiri dari:		
25.1	Pendapatan	5,960,211,476	4,546,871,399
	Rincian pendapatan adalah sebagai berikut:		
	· Pinjaman Uang	5,304,373,660	4,091,429,612
	· Provisi	457,548,500	338,696,000
	· Sewa Kendaraan	198,289,316	116,745,787
25.2	Beban Pokok	209,335,253	206,434,993
	Beban Pokok terdiri dari :		
	· Beban Alat Tulis Kantor	41,802,719	77,403,656
	· Beban Materai dan Pos	15,928,000	17,293,699
	· Beban Sewa Kendaraan	148,592,775	102,942,397
	· Beban Asuransi Kendaraan	3,011,759	8,795,241
26	PENDAPATAN DARI NON - ANGGOTA		
	Akun ini terdiri dari :		
26.1	Pendapatan barang dari non Anggota	10,026,961,408	8,593,175,584
	Akun ini terdiri dari :		
	· Barang Promosi	7,452,726,215.00	7,216,016,431
	· Barang ATK	2,574,235,193.00	1,377,159,153
26.2	Beban Pokok	8,493,480,905	7,294,166,206
	Beban Pokok terdiri dari :		
	Beban Pokok Barang Promosi :		
	Persediaan Awal	439,348,756	449,460,050
	Pembelian	6,208,448,672	5,991,294,506
	Barang Promosi	42,904,300	11,829,950
	· Beban Pengiriman paket ke cabang-cabang	21,558,689	69,134,058
	Persediaan Barang Promosi	513,589,752	439,348,756
	Beban Pokok Barang Promosi	6,198,670,665	6,082,369,808
	Beban Pokok Barang ATK :		
	awal	17,621,500	124,977,115
	pembelian	2,339,902,590	1,104,440,783
	persediaan akhir	62,713,850	17,621,500
	Beban Pokok Barang ATK	2,294,810,240	1,211,796,398

KOPERASI KARYAWAN BANK BJB ZIEBAR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2017 dengan angka perbandingan untuk tahun 2016
(Dinyatakan Dalam Rupiah)

	2017	2016
27 BEBAN USAHA		
Akun ini terdiri dari		
Beban Usaha	5,907,713,901	4,153,191,214
Rincian beban usaha adalah sebagai berikut:		
- Beban Honor Pengelola Koperasi	728,376,604	651,107,017
- Beban Imbalan Kerja	857,864,260	324,601,690
- Beban uang makan pengelola	146,965,000	144,595,000
- Beban Jasa Pengurus	168,000,000	154,000,000
- Beban Jasa Pengawas	108,000,000	57,000,000
- Tunjangan Jamsostek	72,569,110	70,138,471
- Beban Telpon	24,513,008	35,591,281
- Beban Listrik	33,458,042	26,562,000
- Beban Tunjangan DPLK	108,400,000	75,800,000
- Biaya Bunga kredit Cabang Utama	1,147,766,207	428,554,008
- Biaya Provisi Kredit Cab. Utama	88,295,000	25,000,000
- Beban Koran	990,000	1,360,000
- Beban Pelatihan Tenaga Outsourcing	800,000	-
- Beban Transportasi/perjalanan dinas	3,821,000	10,312,573
- Beban Lembur	30,249,500	69,787,419
- Beban Tunjangan Natura	155,478,000	4,000,000
- Beban Kurban	6,000,000	6,000,000
- Beban Jamuan Tamu	24,472,321	19,086,771
- Beban Bensin	24,530,314	22,995,090
- Beban THR Anggota	1,258,734,000	1,048,700,000
- Beban Asuransi Anggota	-	40,468,750
- Beban Iptw	-	30,000,000
- Beban Audit	30,000,000	-
- Beban PPh 21	5,566,057	63,773,125
- Beban Dapur	12,524,144	12,357,098
- Beban Umum Lainnya	40,880,445	77,813,594
- Sewa Laptop	2,100,000	3,600,000
- Beban Rapat	53,157,885	33,185,047
- Beban Parkir	9,384,000	5,983,000
- Beban Rekreasi	200,000,000	200,000,000
- Beban Jasa Legal	11,800,000	9,150,000
- Beban Keperluan Kantor	39,594,600	11,995,800
- Beban PPh 23	-	725,997
- Beban Konsultan Kelembagaan	23,750,000	16,500,000
- Beban Tunjangan Pulsa	10,800,000	9,900,000
- Beban Pemeliharaan Kendaraan	17,905,400	23,113,800
- Beban Pajak PBB / Pajak Lainnya	948,375	766,575
- Beban Sewa Setup Aplikasi Bcore	61,500,000	55,017,005
- Beban Notaris	56,000,000	14,600,000
- Beban Perpanjangan STNK	4,511,800	9,052,000
- Biaya Penyusutan	163,269,329	204,347,703
- Tunjangan Hari Raya	165,739,500	143,542,400
- Olah Raga	9,000,000	8,750,000
- Pengadaan Seragam BJB	-	208,000
- Biaya Perlengkapan Kantor	-	3,150,000

KOPERASI KARYAWAN BANK BJB ZIEBAR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2017 dengan angka perbandingan untuk tahun 2016
(Dinyatakan Dalam Rupiah)

	2017	2016
28 BEBAN PERKOPERASIAN	1,307,556,100	1,632,938,855
Rincian beban perkoperasian adalah sebagai berikut :		
· Beban Rapat Anggota	1,307,556,100	1,619,198,855
· Beban Hari Koperasi		13,740,000
29 Pendapatan dan Beban Lain-lain		
Akun ini terdiri dari:		
29. a Pendapatan Lain-lain	1,396,012,351	1,502,906,673
Rincian pendapatan lain-lain adalah sebagai berikut:		
· Pendapatan Jasa Giro	60,346,690	8,757,005
· Pendapatan Bunga Deposito	-	2,366,948
· Pendapatan Non Operasional	6,561,017	112,578,060
· Pendapatan Umum Lainnya	42,089,788	86,028,160
· Pendapatan Jasa Lainnya	4,101,068	4,970,560
· Pendapatan Deviden	1,253,074,229	1,283,864,240
· Pendapatan Materai Pinjaman	7,259,100	4,341,700
Jasa Tabungan / Bank	1,575,498	-
Pendapatan Sewa Kendaraan	21,004,961	-
29. b Beban Lain-lain	12,760,883	3,296,783
Rincian beban lain-lain adalah sebagai berikut:		
· Administrasi Bank	12,760,883	3,296,783
30 BEBAN PAJAK PENGHASILAN	312,955,478	282,794,815
Penghasilan Kena Pajak	1,452,338,191.96	1,352,925,605
PKP dari bagian peredaran bruto tidak memperoleh fasilitas		
PKP dikurang (Rp4.800.000.000,-/Peredaran Bruto)*PKP		
Pajak Penghasilan Terutang		
50%x25%X(Rp4.800.000.000/Peredaran Bruto)* PKP	312,955,477.66	282,794,815
Fasilitas Pajak		
25% X tidak memperoleh fasilitas		

Pengurus telah menyetujui laporan hasil auditan ini untuk diterbitkan pada2018



KOPERASI KARYAWAN BANK BJB ZIEBAR

NERACA

31 DESEMBER 2018 DAN 2017

(Dinyatakan Dalam Rupiah)

	Catatan	2018	2017
ASET			
Aset Lancar			
Kas dan Setara Kas	3	6,458,538,946	5,384,145,358
Piutang Usaha	4	215,224,750	111,112,187
Piutang Pinjaman Anggota	5	36,581,481,901	26,054,533,556
Persediaan	6	664,389,788	576,861,602
Biaya Dibayar Dimuka	7	263,880,003	260,099,750
Pajak Dibayar Dimuka	8	8,665,163	17,633,633
Properti Investasi	9	39,659,375	52,521,875
Jumlah aset lancar		<u>44,231,839,926</u>	<u>32,456,907,961</u>
Aset Tidak Lancar			
Investasi	10	4,180,000,606	3,134,000,606
Aset Tetap	11	1,692,082,134	1,836,697,701
Aset Lain-lain	12	-	7,098,094,175
Jumlah aset tidak lancar		<u>5,872,082,740</u>	<u>12,068,792,482</u>
JUMLAH ASET		<u>50,103,922,666</u>	<u>44,525,700,443</u>

IKOPIN

Lihat catatan atas laporan keuangan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan



KOPERASI KARYAWAN BANK BJB ZIEBAR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2018 dengan angka perbandingan untuk tahun 2017
(Dinyatakan Dalam Rupiah)

25	PENDAPATAN		
	Akun ini terdiri dari:		
		2018	2017
25.1	Pendapatan	7,183,872,936	5,960,211,476
	Rincian pendapatan adalah sebagai berikut:		
	· Pinjaman Uang	6,339,351,302	5,304,373,660
	· Provisi	624,570,500	457,548,500
	· Sewa Kendaraan	219,951,134	198,289,316
		2018	2017
25.2	Beban Pokok	278,067,529	209,335,253
	Beban Pokok terdiri dari :		
	· Beban Sewa Kendaraan	161,272,052	148,592,775
	· Beban Asuransi Kendaraan	-	3,011,759
	· Beban Ongkos Kirim (Paket)	31,308,796	-
	· Beban Promosi Barang	20,889,200	-
	· Beban Materai dan Pos	18,498,000	15,928,000
	· Beban Alat Tulis Kantor	46,099,481	41,802,719
26	PENDAPATAN DARI NON - ANGGOTA		
	Akun ini terdiri dari :		
		2018	2017
26.1	Pendapatan barang dari non Anggota	9,201,552,065	10,026,961,408
	Akun ini terdiri dari :		
	· Barang Promosi	7,067,328,901	7,452,726,215
	· Barang ATK	1,909,684,173	2,574,235,193
	· Jasa Tabungan / Bank	224,538,991	-
		2018	2017
26.2	Beban Pokok	7,401,829,600	8,493,480,905
	Beban Pokok terdiri dari :		
	Beban Pokok Barang Promosi :		
	· Persediaan Awal	513,589,752	439,348,756
	· Pembelian	5,761,315,251	6,208,448,672
	· Persediaan Barang Promosi	573,138,188	513,589,752
	· Beban Pengiriman Paket ke cabang - cabang	-	21,558,689
	· Barang Promosi	-	42,904,300
	Beban Pokok Barang Promosi	5,701,766,815	6,198,670,665
	Beban Pokok Barang ATK :		
	· awal	62,713,850	17,621,500
	· pembelian	1,728,348,535	2,339,902,590
	· persediaan akhir	90,999,600	62,713,850
	Beban Pokok Barang ATK	1,700,062,785	2,294,810,240



KOPERASI KARYAWAN BANK BJB ZIEBAR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2018 dengan angka perbandingan untuk tahun 2017
(Dinyatakan Dalam Rupiah)

27	BEBAN USAHA	2018	2017
	Akun ini terdiri dari		
	Beban Usaha	2,454,540,706	2,090,774,974
	Rincian beban usaha adalah sebagai berikut:		
	- Beban Gaji & Honor	1,182,996,271	1,151,341,604
	- Beban Tunjangan	64,500,000	
	- Beban Imbalan Kerja	1,207,044,435	939,433,370
		2018	2017
28	BEBAN UMUM & ADMINISTRASI	2,876,316,773	2,472,477,720
	Akun ini terdiri dari:		
	- Beban Kantor	2,293,643,109	1,922,763,474
	- Beban Penjualan	-	800,000
	- Beban Transportasi/perjalanan dinas	30,759,734	37,735,314
	- Beban Pemeliharaan	100,221,400	81,505,400
	- Biaya Penyusutan	163,478,067	163,269,329
	- Beban Administrasi Kantor	81,717,724	98,555,650
	- Beban Konsultan	108,900,000	121,550,000
	- Beban Jamuan	37,253,438	35,272,321
		2018	2017
29	BEBAN PAJAK	60,343,301	11,026,232
	Rincian beban pajak adalah sebagai berikut :		
	- Beban PPh 21	49,127,872	5,566,057
	- Beban Pajak PBB / Pajak Lainnya	860,000	948,375
	- Beban Pajak	177,329	-
	- Beban Perpanjangan STNK	10,178,100	4,511,800
		2018	2017
30	BEBAN PERKOPERASIAN	1,269,350,000	1,415,956,100
	Rincian beban perkoperasian adalah sebagai berikut :		
	- Beban Rapat Anggota	1,159,700,000	1,307,556,100
	- Beban Tunjangan DPLK	109,650,000	108,400,000
		2018	2017
31	BEBAN BUNGA PINJAMAN	1,951,145,486	1,236,061,207
	Rincian beban bunga adalah sebagai berikut :		
	- Biaya Bunga kredit Cabang Utama	1,839,989,784	1,147,766,207
	- Biaya Provisi Kredit Cab. Utama	111,155,702	88,295,000
32	Pendapatan dan Beban Lain-lain		
	Akun ini terdiri dari:	2018	2017
32 a	Pendapatan Lain-lain	1,442,103,316	1,396,012,351
	Rincian pendapatan lain-lain adalah sebagai berikut:		
	- Pendapatan Jasa Giro	-	60,346,690
	- Pendapatan Non Operasional	32,433,366	6,561,017
	- Pendapatan Umum Lainnya	49,680,363	42,089,788
	- Pendapatan Jasa Lainnya	-	4,101,068
	- Pendapatan Dividen	1,331,491,477	1,253,074,229



KOPERASI KARYAWAN BANK BJB ZIEBAR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2018 dengan angka perbandingan untuk tahun 2017
(Dinyatakan Dalam Rupiah)

32 a	Pendapatan Lain-lain (Lanjutan)		
	- Pendapatan Materai Pinjaman	7,127,200	7,259,100
	Jasa Tabungan / Bank	-	1,575,498
	Pendapatan Sewa Kendaraan	21,370,910	21,004,961
		2018	2017
32 b	Beban Lain-lain	45,591,167	12,760,883
	Rincian beban lain-lain adalah sebagai berikut:		
	- Administrasi Bank	45,591,167	12,760,883
		2018	2017
33	BEBAN PAJAK PENGHASILAN	335,482,127	312,955,478
	Penghasilan Kena Pajak	1,550,687,056	1,452,338,192
	PKP dari bagian peredaran bruto tidak memperoleh fasilitas PKP dikurang (Rp4.800.000.000,-/Peredaran Bruto)*PKP		
	Pajak Penghasilan Terutang 50%x25%X(Rp4.800.000.000/Peredaran Bruto)* PKP	335,482,127	312,955,478
	Fasilitas Pajak 25% X tidak memperoleh fasilitas		

Pengurus telah menyetujui laporan hasil auditan ini untuk diterbitkan pada 11 Januari 2019

IKOPIN

